



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Disusun oleh:

**DINAS KESEHATAN
KOTA PEKALONGAN**



90285) 421972



<https://dinkes.pekalongan.go.id>



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dinas Kesehatan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 ini merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

Kami sangat berharap agar LKjIP Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang nantinya akan diperoleh umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan serta dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi bahan masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pekalongan, Februari 2026

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pekalongan



PUJI WINARTI, SKM, M, Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19700502 199501 2 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025. Dinas Kesehatan pada tahun 2025 memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan total 2 (dua) indikator kinerja, dan 2 (dua) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Kesehatan pada tahun 2025 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Kesehatan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 83.

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2025 nilai SAKIP Dinas Kesehatan sebesar 83,25 dengan predikat A. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,30%.

2. Indikator capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dengan target yang ditetapkan 100%

Berdasarkan penilaian SPM Kesehatan yang dilakukan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri bahwa untuk penilaian tahun 2025 nilai capaian SPM Kesehatan sebesar 99,89%. Sehingga capaian untuk indikator kinerja SPM Kesehatan sebesar 99,89%.

Kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 113.999.369.961,00 atau 94,15% dari total pagu anggaran sebesar Rp 121.083.144.000,00.

Capaian kinerja Dinas Kesehatan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 LATAR BELAKANG.....	1
	1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
	1.3 KONDISI APARATUR.....	7
	1.4 SARANA DAN PRASARANA.....	7
	1.5 ISU STRATEGIS.....	8
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	10
	2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026.....	10
	2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026.....	12
	2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	15
	3.1 PENGUKURAN KINERJA.....	15
	3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	18
	3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	27
	3.4 PRESTASI YANG DIRAIH.....	31
BAB IV	PENUTUP.....	36
	LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kerja tahun 2025. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan adalah:

1. Mengetahui pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.
2. Sebagai acuan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam peningkatan kinerja.
3. Sebagai bukti pertanggungjawaban akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu juga menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Kesehatan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam laporan ini, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan



dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.2.1 Deskripsi Perangkat Daerah

Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki beberapa poin penting antara lain mengubah fokus dari pengobatan menjadi pencegahan, mempermudah akses layanan kesehatan, mempersiapkan sistem kesehatan yang tangguh menghadapi bencana, meningkatkan efisiensi dan transparansi pembiayaan kesehatan, melindungi tenaga kesehatan. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang diorganisir oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber daya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititik beratkan pada upaya penyembuhan penderita, secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Walaupun demikian kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat perlu diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya promotif dan preventif dirasa belum optimal sehingga direformasi ke Paradigma Sehat yang akan meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk.

Untuk mewujudkan Paradigma Sehat sebagai paradigma pembangunan kesehatan yang baru, telah dirumuskan Tujuan Pembangunan Kesehatan Kota



Pekalongan yaitu “**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**”. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut Dinas Kesehatan mempunyai arah kebijakan pembangunan di bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2026.

Adapun arah kebijakan di bidang kesehatan tersebut antara lain :

- 1) Peningkatan mutu pelayanan KB sesuai standar di Puskesmas dan RS;
- 2) Mempersiapkan 14 Puskesmas menjadi Puskesmas mampu persalinan;
- 3) Peningkatan cakupan imunisasi melalui Posyandu dan peningkatan peran CSR;
- 4) Semua persalinan baik di Fasyankes pertama maupun rujukan wajib melaksanakan IMD, implementasi Perda ASI Eksklusif;
- 5) Semua balita kurang gizi mendapatkan Makanan Tambahan (PMT) dan balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan lewat Posyandu maupun secara mandiri;
- 6) Penjaringan Suspek TB Paru dengan kunjungan rumah dan pemeriksaan kontak erat pada kasus BTA Positif;
- 7) Penjaringan dan edukasi masyarakat untuk pemeriksaan secara teratur minimal 6 bulan sekali;
- 8) Peningkatan pelayanan dan pelatihan petugas serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk penanganan penderita gangguan jiwa berat;
- 9) Implementasi Perda KTR, lomba PHBS dan monitoring KTR di sekolah, tempat umum dan tempat kerja serta tempat ramah anak;
- 10) Monitoring penggunaan air bersih untuk rumah tangga dan penyakit yang ditularkan melalui air;
- 11) Meningkatkan cakupan ODF dan Monitoring jamban keluarga pada 27 Kelurahan;
- 12) Penambahan dukungan anggaran untuk terwujudnya Universal Health Coverage



Sesuai Misi 7 dalam RPJMD, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Government* dan *Clean Government*, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan juga memiliki arah kebijakan antara lain:

- 1) Meningkatkan implementasi SOP Pelayanan Publik dalam mendukung capaian kinerja
- 2) Meningkatkan dukungan administrasi perkantoran
- 3) Meningkatkan dukungan ketercukupan sarpras aparatur
- 4) Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan
- 5) Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
- 6) Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan

Tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran dan cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan tahunan.

1.2.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan dan penetapan sasaran, program bidang kesehatan
- 2) perumusan kebijakan bidang kesehatan
- 3) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pelayanan kesehatan
- 4) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang sumber daya kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan
- 5) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit
- 6) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan
- 7) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD



- 8) pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP)
- 9) pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.2.3 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan
- d. Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- f. Unit Organisasi Bersifat Khusus yaitu RSUD Bendan Kota Pekalongan
- g. Unit Organisasi Bersifat Fungsional, terdiri dari :
 - 1) UPT Puskesmas Bendan (Puskesmas Rawat Inap)
 - 2) UPT Puskesmas Medono
 - 3) UPT Puskesmas Kramatsari
 - 4) UPT Puskesmas Tirto
 - 5) UPT Puskesmas Noyontaan
 - 6) UPT Puskesmas Tondano
 - 7) UPT Puskesmas Klego
 - 8) UPT Puskesmas Sokorejo (Puskesmas Rawat Inap)
 - 9) UPT Puskesmas Kusuma Bangsa (Puskesmas Rawat Inap)
 - 10) UPT Puskesmas Krapyak Kidul
 - 11) UPT Puskesmas Dukuh
 - 12) UPT Puskesmas Pekalongan Selatan (Puskesmas Rawat Inap)
 - 13) UPT Puskesmas Jenggot

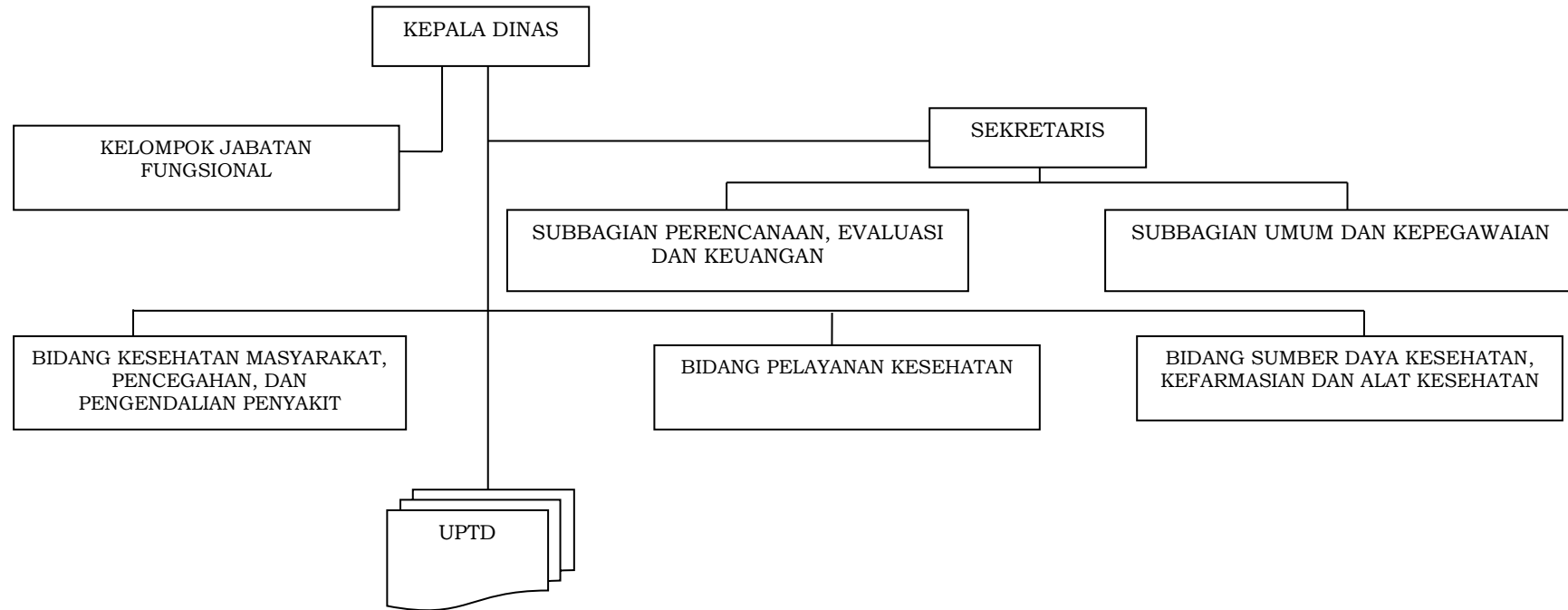


- 14) UPT Puskesmas Buaran
 - h. UPTD, terdiri dari :
 - 1) UPTD Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu (BPSJ)
 - 2) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN





1.3 KONDISI APARATUR

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 735 orang dengan perincian sebagai berikut :

- PNS : 414 orang
- CPNS : 0 orang
- PPPK : 62 orang
- PPPK Paruh Waktu : 180 orang
- Tenaga Kontrak : 1 orang
- Tenaga BLUD : 64 orang
- Tenaga Kegiatan : 13 orang
- Tenaga Hibah : 1 orang
- Jumlah (Total) : 735 orang

1.4 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana Pemerintah yang ada di Kota Pekalongan yang bersifat pelayanan kesehatan antara lain meliputi:

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana Kesehatan Pemerintah di Kota Pekalongan
Tahun 2025

No	Jenis Sarana Kesehatan Milik Pemerintah	Barat	Timur	Utara	Selatan	Total
1	Rumah Sakit	1	0	0	0	1
2	Puskesmas Rawat Jalan	3	3	2	2	10
3	Puskesmas Rawat Inap	1	1	1	1	4
4	Puskesmas Pembantu	7	5	6	5	23
5	Posyandu	130	106	100	80	416
6	Klinik Pratama	2	0	4	0	6
7	Instalasi Farmasi Kota	0	1	0	0	1
8	Labkesda	1	0	0	0	1
9	Apotek (BUMN)	1	0	1	0	2



Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Kesehatan Milik Swasta di Kota Pekalongan
Tahun 2025

No	Jenis Sarana Kesehatan Milik Swasta	Barat	Timur	Utara	Selatan	Total
1	Rumah Sakit	3	2	1	1	7
2	Klinik Utama	3	1	2	0	6
3	Klinik Pratama	10	7	8	1	26
4	Apotek	19	30	8	16	73
5	Industri Alkes	1	3	2	1	7
6	Praktik Dokter Umum	16	16	13	8	53
7	Praktik Dokter Spesialis	0	2	2	0	4
8	Praktik Dokter Gigi	8	4	2	1	15
9	Praktik Bidan	7	5	1	4	17
10	Praktik Perawat	1	1	1	0	3

1.5 ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2021-2026 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM, SDG's) maka indikator yang belum tercapai dan menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya angka kematian ibu. Adapun faktor penyebab kematian ibu maternal adalah eklampsia, perdarahan, emboli, gagal jantung (*decompensasicordis*).
- 2) Masih tingginya angka kematian bayi. Adapun faktor penyebab kematian bayi adalah BBLR, asfiksia, kelainan bawaan, ikterus, dan penyebab lain.
- 3) Masih tingginya angka kematian balita. Adapun faktor penyebab kematian balita adalah pneumonia dan infeksi pencernaan.
- 4) Masih ditemukannya gizi buruk pada balita. Adapun faktor penyebab adalah penyakit infeksi, pola asuh yang kurang baik.
- 5) Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular (DBD, HIV/AIDS, kusta, TB, filariasis). Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan yang kurang sehat.
- 6) Kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular (hipertensi, DM, jantung) dan gangguan kejiwaan. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup dan pola makanyang tidak sehat serta lingkungan sosial yang tidak mendukung.
- 7) Masih kurangnya sarana, prasarana pendukung pelayanan kesehatan baik sarana



medis, sarana penunjang pelayanan medis dan non medis.

- 8) Masih kurangnya akses/jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis



strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment/cascading* dari program serta tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada
Dinas Kesehatan Tahun 2025

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2025
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius	-	-
Misi Ke-1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-
Tujuan Kota : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74.62
Tujuan Dinas Kesehatan 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.37
Sasaran Dinas Kesehatan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	83
Program Dinas Kesehatan 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%



Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2025
Kegiatan Dinas Kesehatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
Tujuan Dinas Kesehatan 2 : Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,40
Sasaran Dinas Kesehatan 2 : Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	Presentase capaian SPM Kesehatan	100%
Program Dinas Kesehatan 2 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92%
Kegiatan Dinas Kesehatan 2 : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100%

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Kesehatan disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2

Target Sasaran Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N	Inspektorat
2.	Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal	Persentase Capaian SPM Kesehatan	Persen	Rata-rata capaian indikator SPM Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan



Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Target Sasaran Kinerja Dinas Kesehatan
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	87,50	88	88,50	82,50	83	83,50
2.	Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal	Persentase Capaian SPM Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.



Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	2025	
			Satuan	Target
Tujuan				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80
2.	Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,40
Sasaran				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	83
2.	Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	100

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 67.380.180.000	APBD
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 50.162.040.000	APBD dan DAK
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 525.219.000	APBD dan DAK
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 483.625.000	APBD dan DAK
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 2.532.080.000	APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Kesehatan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

- **Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya**
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
- **Arahan Operasional**
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- **Akuntabilitas**
Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan



masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ Perencanaan

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ Pengelolaan

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ Penganggaran

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ Penyediaan pelayanan kepada pihak luar

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis,



cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi /
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Skor	83	83,25	100,30%	Sangat berhasil
2.	Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	100%	99,89%	99,89%	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kinerja tabel di atas dapat diketahui :

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 1 (satu) target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 (satu) target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 99,95% dengan kategori Sangat Berhasil.



Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
				2023	2024	2025	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Skor	82,15	83,2	83,25	▲
2.	Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	95,56	97,52	99,89	▲

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Skor	83,25 (A)	83,5	99,7	Sangat Berhasil
2.	Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	99,89	100	97,52	Sangat berhasil

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi/Nasional/Internasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Provinsi/ Nasional/ Internasional	Capaian (%)	Kategori
1.	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	Indeks	A	BB - A	100	Sangat berhasil
2..	Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	99,89	100	99,89	Sangat berhasil

3.2.2 Capaian Kinerja Tujuan

Adapun kesimpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :



Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,37	94,54	113,40	Sangat berhasil
2.	Meningkatkan indeks keluarga sehat	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,40	0,40	100	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui :

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 (dua) target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 106,7 % dengan kategori Sangat Berhasil.

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 mendapatkan angka nilai capaian sebesar 100,85% dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Nilai SAKIP OPD	-	Skor	82,15	83,2	83	83,25	100,30	83,5

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah.

Tahun 2025 Hasil evaluasi AKIP Dinas Kesehatan memperoleh nilai 83,25 atau predikat “A”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan



pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Kesehatan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	21,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	83,25
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	

Tabel 3.8 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI AKIP TAHUN 2025	NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI AKIP TAHUN 2025
1	BKPSDM	84,00	17	Kec. Barat	76,50
2	Inspektorat Daerah	84,75	18	Dinperpa	76,40
3	BPKAD	84,60	19	Bakesbangpol	73,75
4	DKP	83,27	20	Kec. Timur	76,45
5	Dinas Kesehatan	83,25	21	Kec. Selatan	77,15
6	Dindikcapil	82,95	22	DPMPPTSP	78,00
7	Sekretariat Daerah	81,85	23	Dinas Pendidikan	78,50
8	Dindagkop-UKM	85,70	24	Dinperkim	74,80
9	DPMPPA	83,55	25	Dinperinaker	75,45
10	Bapperida	88,70	26	Dinhub	77,00
11	Satpol P3KP	75,50	27	Sekretariat DPRD	75,00
12	Dinarpus	76,10	28	Kota Pekalongan	73,28
13	Dinparbudpora	78,15	29	DPUPR	83,05
14	Kec. Utara	76,65	30	DLH	85,95
15	BPBD	76,00	31	Dinkominfo	83,50
16	Dinsos P2KB	76,35			

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP



b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar *stakeholder* di subbagian perencanaan dan evaluasi dengan bidang-bidang dalam satu Organisasi Perangkat Daerah;

c. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	ALASAN MENGAPA KEGIATAN TERSEBUT MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.985.000	25.335.000	24.772.800	<ul style="list-style-type: none">- Dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang salah satu indikatornya adalah kelengkapan dokumen SAKIP OPD- Dokumen SAKIP OPD yang lengkap memudahkan dalam proses penilaian dan evaluasi yang menentukan nilai SAKIP OPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	65.452.026.000	65.132.584.000	59.306.687.929	Administrasi keuangan merupakan instrumen strategis dalam mendukung akuntabilitas kinerja OPD.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	474.485.000	412.998.000	410.823.215	Terdapat kegiatan penyediaan prasarana dan sumber daya yang mendukung capaian nilai SAKIP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.167.587.000	1.168.667.000	1.087.005.135	Terdapat kegiatan yang mendukung SDM untuk mewujudkan tercapainya nilai SAKIP yang optimal
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.430.000	640.180.000	603.611.803	Terdapat kegiatan yang mendukung penyediaan sarana dan prasarana penunjang tercapainya nilai SAKIP yang optimal
Jumlah		67.379.764.000	61.432.900.882	

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



KEGIATAN	EFISIENSI ANGGARAN	EFISIENSI SDM	EFISIENSI WAKTU
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Anggaran Rp 25.335.000- Realisasi anggaran Rp 24.772.800 (97,78%)- Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 2,22% yang berasal dari dokumen-dokumen SAKIP beberapa ada yang berbentuk file digital sehingga mengurangi biaya cetak	Efisiensi SDM meningkat karena penggunaan media daring seperti <i>Whatsapp</i> grup memudahkan proses komunikasi dengan petugas di Puskesmas	Proses pengumpulan dokumen sudah dilakukan dari triwulan awal (sebagai bahan <i>evidence</i> penilaian kinerja triwulanan) sehingga memudahkan saat proses evaluasi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Anggaran Rp 65.132.584.000- Realisasi anggaran Rp 59.306.687.929- Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 8,94%	Efisiensi SDM meningkat karena penggunaan media daring seperti <i>Whatsapp</i> grup memudahkan proses komunikasi dengan petugas di Puskesmas	Proses pengumpulan dokumen sudah dilakukan dari triwulan awal (sebagai bahan <i>evidence</i> penilaian kinerja triwulanan) sehingga memudahkan saat proses evaluasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Anggaran Rp 412.998.000- Realisasi anggaran Rp 410.823.215- Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,53%	Efisiensi SDM meningkat karena penggunaan media daring seperti <i>Whatsapp</i> grup memudahkan proses komunikasi dengan petugas di Puskesmas	Proses pengumpulan dokumen sudah dilakukan dari triwulan awal (sebagai bahan <i>evidence</i> penilaian kinerja triwulanan) sehingga memudahkan saat proses evaluasi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Anggaran Rp 1.168.667.000- Realisasi anggaran Rp 1.087.005.135- Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 6,99%	Efisiensi SDM meningkat karena penggunaan media daring seperti <i>Whatsapp</i> grup memudahkan proses komunikasi dengan petugas di Puskesmas	Proses pengumpulan dokumen sudah dilakukan dari triwulan awal (sebagai bahan <i>evidence</i> penilaian kinerja triwulanan) sehingga memudahkan saat proses evaluasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Anggaran Rp 640.180.000- Realisasi anggaran Rp 603.611.803- Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 5,71%	Efisiensi SDM meningkat karena penggunaan media daring seperti <i>Whatsapp</i> grup memudahkan proses komunikasi dengan petugas di Puskesmas	Proses pengumpulan dokumen sudah dilakukan dari triwulan awal (sebagai bahan <i>evidence</i> penilaian kinerja triwulanan) sehingga memudahkan saat proses evaluasi

Kesimpulan efisiensi :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 1. Penghematan anggaran 2,22%
 2. Produktivitas SDM meningkat
 3. Penyelesaian pengumpulan dokumen SAKIP lebih cepat
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh penghematan anggaran sebesar 8,94%.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh penghematan anggaran sebesar 0,53%.



- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh penghematan anggaran sebesar 6,99%.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh penghematan anggaran sebesar 5,71%.

SASARAN 2 : Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

Capaian indikator sasaran Persentase Capaian SPM Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase capaian SPM Kesehatan	88,06	Persen	95,56	97,52	100	99,89	99,89	100

Berikut adalah perbandingan capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025 dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah :

Tabel 3.10 Perbandingan Indeks Pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No.	Daerah	Capaian SPM Kesehatan (persen)
1.	Kota Semarang	100%
2.	Kab. Banyumas	100%
3.	Kab. Purworejo	100%
4.	Kab. Sragen	100%
5.	Kab. Karanganyar	100%
6.	Kab. Wonogiri	100%
7.	Kab. Klaten	100%
8.	Kab. Rembang	100%
9.	Kab. Pati	100%
10.	Kab. Semarang	100%
11.	Kab. Demak	100%
12.	Kab. Kudus	100%
13.	Kab. Temanggung	100%
19.	Kota Salatiga	99,92%
20.	Kab. Batang	99,92%
21.	Kota Pekalongan	99,91%
22.	Kab. Jepara	99,91%
23.	Kab. Pekalongan	99,33%
24.	Kab. Cilacap	99,33%
25.	Kab. Sukoharjo	98,76%
26.	Kab. Wonosobo	98,76%
27.	Kab. Magelang	98,24%
28.	Kab. Pemasang	98,24%
29.	Kota Tegal	97,62%
30.	Kab. Tegal	97,62%
31.	Kab. Blora	96,2%



No.	Daerah	Capaian SPM Kesehatan (persen)	No.	Daerah	Capaian SPM Kesehatan (persen)
14.	Kab. Purbalingga	100%	32.	Kab. Grobogan	96,2%
15.	Kab. Kebumen	100%	33.	Kab. Boyolali	94,91%
16.	Kab. Banjarnegara	100%	34.	Kab. Kendal	94,91%
17.	Kota Magelang	100%	35.	Kab. Brebes	88,25%
18.	Kota Surakarta	99,98%			

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- Meningkatnya upaya promosi kesehatan terhadap masyarakat
- Meningkatnya program upaya pencegahan kematian ibu, bayi, dan balita
- Tersedianya anggaran yang mendukung pelaksanaan program penunjang SPM
- Tersedianya SDM yang memadai untuk melaksanakan program penunjang SPM

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	ALASAN MENGAPA KEGIATAN TERSEBUT MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.987.467.000	15.330.180.000	15.117.990.409	Ketersediaan sarana prasarana dan alkes yang memadai memudahkan dalam memberikan pelayanan kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.180.340.000	34.743.560.000	33.846.087.339	Pemberian layanan kesehatan sesuai standar akan meningkatkan pelayanan kesehatan dan SPM bidang kesehatan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	37.430.000	37.430.000	35.561.000	Ketersediaan data dan informasi kesehatan yang terintegrasi memudahkan dalam memberikan pelayanan kesehatan
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.870.000	50.870.000	50.864.000	Penerbitan izin rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan akan meningkatkan akses dan penjaminan mutu layanan kesehatan



KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	ALASAN MENGAPA KEGIATAN TERSEBUT MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	525.219.000	525.219.000	525.174.000	Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan akan meningkatkan ketersediaan SDM kesehatan dalam pelayanan kesehatan
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	43.671.000	43.671.000	43.043.856	Pemberian izin apotek, toko obat, toko alkes dan optic akan menjamin keamanan sediaan farmasi dalam pelayanan kesehatan
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	411.864.000	411.864.000	405.655.630	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT akan menjamin keamanan produk pangan di masyarakat
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	35.590.000	28.090.000	27.698.000	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) akan menjamin higiene sanitasi di tempat pengolahan pangan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.572.040.000	2.487.040.000	2.469.354.245	Kegiatan pemberdayaan kader kesehatan sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas kader untuk dapat memberikan informasi dan edukasi kesehatan bagi masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	45.040.000	45.040.000	45.040.000	Kegiatan promosi kesehatan berperan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat
Jumlah		53.702.964.000	52.566.468.479	

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.



Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 53.702.964.000 - Realisasi anggaran Rp 52.566.468.479 (97,88%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya efisiensi 2,12% 	Efisiensi SDM meningkat karena penggunaan media daring seperti <i>Whatsapp</i> grup memudahkan proses komunikasi dengan petugas di Puskesmas	Proses pengumpulan data rutin dilakukan setiap bulan sehingga memudahkan saat pelaporan dan evaluasi

Kesimpulan efisiensi :

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 2,12%
2. Produktivitas SDM meningkat
3. Pelaksanaan kegiatan hingga pelaporan dan evaluasi lebih mudah dan tepat waktu

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kesehatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp 121.083.144.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp 113.999.369.961,00 atau sebesar 94,15%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp 56.034.845.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 54.775.519.932,00 atau sebesar 97,75%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11

Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Perencanaan, Penganggaran, dan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	7.998.000	99,98



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
2	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.485.000	3.485.000	100
3			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.850.000	13.289.800	95,96
4		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.048.299.000	59.223.850.029	91,05
5			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.055.000	79.655.000	98,27
6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.230.000	3.182.900	98,54
7		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
8		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.650.000	3.648.000	99,95
9			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.920.000	193.968.266	99
10			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.480.000	5.464.000	99,71
11			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.420.000	74.382.000	99,95
12			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.600.000	14.597.949	99,99
13			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.300.000	1.260.000	96,92
14			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.044.000	117.503.000	99,54
15			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	440.000	422.520
16		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		625.383.000	573.298.038	91,67
17		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		542.844.000	513.284.577	94,55
18		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	174.230.000	147.477.400	84,65
19			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	418.500.000	408.696.238	97,66
20			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.450.000	47.438.165	99,98
21		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.681.648.000	5.679.436.100
22	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			329.560.000	324.185.000	98,37



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)	
23	KESEHATAN MASYARAKAT		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	89.930.000	87.045.000	96,79	
24			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	32.820.000	31.203.909	95,08	
25			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	348.420.000	347.744.099	99,81	
26			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	8.822.602.000	8.623.176.301	97,74	
27			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	25.200.000	25.200.000	100	
28			Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	91.250.000	87.448.640	95,83
29				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	264.600.000	264.374.500	99,91
30		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		114.190.000	113.670.000	99,54	
31		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		70.780.000	69.137.000	97,68	
32		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		75.853.000	73.904.110	97,43	
33		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		19.750.000	18.911.000	95,75	
34		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		4.810.000	4.810.000	100	
35		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		4.600.000	4.600.000	100	
36		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		8.410.000	8.410.000	100	
37		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		30.160.000	30.148.000	99,96	
38		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		24.170.000	24.170.000	100	
39		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		157.578.000	145.676.295	92,45	
40		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		35.870.000	35.305.600	98,43	
41		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		131.940.000	129.515.520	98,16	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
42			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	963.469.000	956.938.323	99,32
43			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	291.190.000	281.983.900	96,84
44			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.688.226.000	29.908.990.900	97,46
45			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	34.490.000	34.486.000	99,99
46			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.686.964.000	1.608.397.551	95,34
47			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	21.900.000	21.850.000	99,77
48			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	23.360.000	23.360.000	100
49		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	37.430.000	35.561.000	95,01
50		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	50.870.000	50.864.000	99,99
51	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	525.219.000	525.174.000	99,99
52	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	43.671.000	43.043.856	98,56
53		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	411.864.000	405.655.630	98,49



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
54		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	28.090.000	27.698.600	98,61
55	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.487.040.000	2.469.354.245	99,29
56		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	45.040.000	45.040.000	100
TOTAL				121.083.144.000	113.999.369.961	94,15

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa anggaran program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025 sebesar Rp 121.083.144.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 113.999.369.961,00 atau sekitar (94,15%).

3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

3.4.1 Prestasi Dinas Kesehatan

1. Penghargaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal Terbaik Regional 1





Senin, 8 Desember 2025, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan tanda penghargaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Puskesmas, pengelola tempat kerja, dan individu/relawan. Kategori penghargaan antara lain :

- Penghargaan Cek Kesehatan Gratis
- Penghargaan Bidang Pelayanan Kesehatan Keluarga
- Penghargaan Bidang Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan
- Penghargaan Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas
- Penghargaan Bidang Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Penghargaan Bidang Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer

Kota Pekalongan merupakan salah satu penerima penghargaan tersebut dalam Bidang Pelayanan Kesehatan Keluarga kategori Pemberian Makanan Tambahan Lokal terbaik Wilayah Regional 1.

Adapun kriteria penghargaan dalam Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal sebagai berikut:

- a) Penyerapan DAK Non Fisik >85%
- b) Puskesmas input data sigizikesga >80%
- c) Capaian D/S >85%
- d) Ibu hamil KEK/Resiko KEK mendapat PMT >80%
- e) Balita gizi kurang mendapat PMT >60%

Kota Pekalongan telah memenuhi semua kriteria penilaian tersebut sehingga terpilih untuk menerima penghargaan PMT Lokal terbaik Regional 1.

Keberhasilan ini merupakan kerja keras dan kerja sama Dinas Kesehatan, Puskesmas dan masyarakat (Kader Kesehatan) yang telah berupaya semaksimal mungkin dalam pelaksanaan PMT Lokal. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi semua untuk lebih baik lagi dalam pelaksanaan PMT Lokal di Kota Pekalongan, dimana PMT Lokal merupakan salah satu upaya dalam pencegahan stunting, sehingga diharapkan angka stunting di Kota Pekalongan akan turun.



2. Penghargaan di Bidang Kesehatan Lingkungan

Dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional Tahun 2025, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memberikan Apresiasi/Penghargaan kepada petugas yang berhasil meningkatkan kualitas pembinaan program Kesehatan Lingkungan khususnya Program Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) Sehat, Tempat Pengolahan Pangan (TPP), dan Pemeriksaan Kualitas Air Minum (PKAM) di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Puskesmas se-Jawa Tengah. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan mendapatkan penghargaan sebagai Pelaksana Terbaik III dalam pembinaan program kesehatan lingkungan provinsi Jawa Tengah. Penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus berinovasi dan berkolaborasi bersama lintas sektor terkait dalam peningkatan kualitas lingkungan di Kota Pekalongan.



3.4.2 Inovasi di Dinas Kesehatan

1. Inovasi KISS BAY (Kiat Sehat Seputar Bayi)

Kiss Bay (Kiat Sehat Seputar Bayi) adalah inovasi media promosi yang kekinian berupa *podcast* dan buku saku elektronik sebagai upaya promosi dan edukasi kesehatan ibu dan anak. Inovasi ini dilatarbelakangi kasus kematian bayi usia 0 - 1 tahun di Kota Pekalongan yang masih tinggi.



Jumlah kasus dalam 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan, tahun 2021 ada 52 kasus, tahun 2022 ada 56 kasus dan tahun 2023 ada 67 kasus kematian bayi. Dinas Kesehatan melakukan berbagai upaya, salah satu upaya yang perlu ditingkatkan kualitasnya adalah upaya promosi kesehatan dan edukasi kesehatan ibu dan anak. Inovasi Kiss Bay merupakan media promosi yang dapat diakses banyak orang dengan tampilan lebih menarik daripada media konvensional yang dapat diakses masyarakat dengan ponsel, akses web, maupun media sosial Dinkes/Puskesmas/Kominfo.

Data dari Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian, Penyakit pada tahun 2024 terdapat 42 kasus kematian bayi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan kasus kematian bayi, yaitu dari 67 kasus menjadi 42 kasus. Salah satu faktor pendukung yang mendukung keefektifan program penurunan kasus kematian bayi adalah adanya media promosi yang baik, di samping faktor-faktor pendukung lainnya. Dengan adanya inovasi Kiss Bay diharapkan pada tahun-tahun berikutnya jumlah kasus kematian bayi akan semakin menurun.

2. Inovasi DIMENSI PEKA

Kesehatan jiwa atau kesehatan mental adalah bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan. Di Kota Pekalongan, isu gangguan mental emosional telah menjadi perhatian yang semakin mendesak. Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan bahwa prevalensi gangguan mental emosional di masyarakat cukup tinggi sekitar 20%. Gangguan yang dialami seperti stres, depresi dan kecemasan, terus meningkat di kalangan masyarakat. Permasalahan ini diperparah oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya, yang memerlukan perhatian dan penanganan segera. Inovasi Dimensi Peka (Deteksi dini gangguan mental emosional di Kota Pekalongan) muncul sebagai solusi yang diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan ini. Melalui inovasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan mental, mengurangi stigma sosial, memperbaiki akses dan kualitas layanan kesehatan mental, serta memungkinkan deteksi dan intervensi dini yang efektif. Inovasi ini juga diharapkan dapat mengumpulkan data yang lebih akurat mengenai prevalensi dan karakteristik gangguan mental emosional



di masyarakat, yang akan sangat berguna untuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan yang lebih baik.

Program DIMENSI PEKA memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut :

- Dengan mendeteksi dini gangguan mental emosional pada Masyarakat di kota Pekalongan terutama yang berusia 14 sampai 59 tahun masalah dapat diidentifikasi dan diintervensi lebih cepat dan efektif.
- Program ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, mengurangi stigma, dan mendorong masyarakat untuk mencari bantuan. Program ini menyediakan akses ke layanan konseling profesional, memastikan lebih banyak orang mendapatkan perawatan yang diperlukan.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan kesehatan mental prioritas, mencegah meningkatnya gangguan jiwa, dan mengurangi beban sosial dan ekonomi.
- DIMENSI PEKA memberikan dukungan komprehensif dan holistik, memastikan kesehatan mental mendapatkan

Dengan inovasi DIMENSI PEKA maka petugas bisa mendeteksi gangguan mental emosional yang ada di masyarakat dengan lebih awal serta dapat mengetahui kondisi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sehingga dalam membantu dalam memberikan intervensi yang tepat waktu dan mencegah perkembangan gangguan menjadi lebih parah. Hal ini berarti individu dapat menerima perawatan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka, meningkatkan peluang kesembuhan dan pemulihan yang optimal. Selain itu, dengan mengelola gangguan mental secara proaktif, program ini juga berpotensi meningkatkan kualitas hidup individu yang terkena dan mengurangi dampak negatifnya terhadap kehidupan sehari-hari. Selain manfaat individual, program ini juga memberikan dampak positif pada tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang masalah kesehatan mental serta dapat menurunkan angka prevalensi gangguan jiwa di Kota Pekalongan.



BAB IV PENUTUP

4.1 SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana, dan sarana secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan pada tahun anggaran 2025 merupakan tahun ke-5 (lima) dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Hasil capaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

➤ **Sasaran strategis 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari indikator kinerja :**

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2025 nilai SAKIP Dinas Kesehatan sebesar 83,25 dengan predikat A. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,30%.

➤ **Sasaran strategis 2 Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, terdiri dari indikator kinerja :**

Berdasarkan penilaian SPM Kesehatan yang dilakukan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri bahwa untuk penilaian tahun 2025 nilai capaian SPM Kesehatan sebesar 99,89%. Sehingga capaian untuk indikator kinerja SPM Kesehatan sebesar 99,89%.

4.2 PERMASALAHAN DAN LANGKAH KE DEPAN

Dari hasil capaian Sasaran Strategis di atas, maka upaya yang akan dilakukan di masa mendatang adalah:

1. Melakukan tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kesehatan tahun 2025 dengan meningkatkan koordinasi terhadap *stakeholder* terkait.
2. Meningkatkan upaya promosi kesehatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan sebagai upaya peningkatan capaian SPM Kesehatan yang lebih baik lagi.



Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024
I.	Pendapatan				
	Hasil Retribusi Daerah	550.000.000	615.289.000	111,87	513.905.400
	Retribusi Jasa Umum	270.000.000	488.282.000	180,85	513.905.400
	Retribusi Jasa Usaha	280.000.000	127.007.000	45,36	0
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	550.000.000	615.289.000	111,87	513.905.400
II.	Belanja				
	Belanja Operasi	114.535.002.000	107.463.619.510	93,83	103.937.375.915
	Belanja Modal	6.547.726.000	6.535.750.451	99,82	5.494.427.890
	JUMLAH BELANJA	121.082.728.000	113.999.369.961,00	94,15	109.431.803.805,00
	Surplus/Defisit	(120.532.728.000)	(113.384.080.961)	94,07	(108.917.898.405)

Secara umum, serapan anggaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025 cukup baik dan efisien. Beberapa anggaran tidak dapat terserap secara maksimal dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran. Masih adanya indikator kinerja yang belum mampu dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, menunjukkan perlu adanya peningkatan kinerja dan analisis penyelesaian terhadap hambatan yang ada sehingga seluruh target yang telah ditetapkan mampu dicapai dengan baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang dan sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pekalongan, Februari 2026
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pekalongan



PUJI WINARTI, SKM, M, Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19700502 199501 2 001



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PUJI WINARTI, S.K.M, M.Kes.**

Jabatan : **Kepala Dinas Kesehatan**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 23 September 2025

Wali Kota Pekalongan



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Kepala Dinas Kesehatan



PUJI WINARTI, S.K.M, M.Kes.
NIP. 19700502 199501 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	Formulasi : Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,4	Formulasi : Hasil Pendataan PIS PK Dinas Kesehatan Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinkes
Sasaran :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	83	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal	Persentase capaian SPM Kesehatan	100	Formulasi : Rata-rata capaian indikator SPM Bidang Kesehatan Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinkes

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 67.380.180.000	APBD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 50.162.040.000	APBD
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 525.219.000	APBD
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 483.625.000	APBD
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 2.532.080.000	APBD
Jumlah	Rp 121.083.144.000	

Pekalongan, 23 September 2025

Wali Kota Pekalongan



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Kepala Dinas Kesehatan



**PUJI WINARTI, S.K.M., M.Kes.
NIP. 19700502 199501 2 001**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2021-2026**

1. Nama OPD : Dinas Kesehatan
2. Tugas : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesehatan
3. Fungsi : a. Perumusan dan penetapan sasaran, program urusan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan
b. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan
c. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan
d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
e. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan keuangan
f. Pengoordinasian pembimbingan dan pengendalian operasionalisasi program dan kegiatan
g. Pengarahan dan pengordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang Kesehatan
h. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya
i. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas
j. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

NO	SASARAN	INDIAKTOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	3	4	5	6	7	5	6	7	8
1	MENINGKATKANNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun N	Indeks	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	Bagian Organisasi
		2 Nilai SAKIP OPD	Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD tahun N	Indeks	87,50	88,00	88,50	82,50	83,00	83,50	Inspektorat
2	MENINGKATNYA INDEKS KELUARGA SEHAT	1 Indeks Keluarga Sehat	Hasil Pendataan PIS PK Dinas Kesehatan	Indeks	0,22	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	Dinkes
		2 Persentase Capaian SPM Kesehatan	Rata-rata capaian Indikator SPM Bidang kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinkes

Pekalongan, Januari 2025



Kecala Dinas Kesehatan
Kota Pekalongan
Dr. Satrio Sudyanto, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 199303 1 005